

Bab II : WAWASAN PEMBANGUNAN

1. Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangsaan

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJP II) merupakan masa kebangkitan nasional kedua sehingga merupakan saat yang tepat untuk mengkaji kembali berbagai pandangan mengenai wawasan kebangsaan, serta memantapkan dan memperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam memasuki abad ke-21, abad yang penuh dengan harapan dan tantangan, tetapi juga dengan tempo perubahan yang tinggi, ada baiknya kita menyegarkan kembali pandangan mengenai paham kebangsaan dan perannya dalam pembangunan pada abad yang akan datang itu.

Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Sejarah

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan, tidak akan terlepas dari perjalanan sejarah perjuangan suatu bangsa. Pemahaman kebangsaan itu dirangsang oleh pertanyaan-pertanyaan yang kerap tumbuh dalam hati sanubari, seperti mengapa ada pahlawan dan syuhada yang berjuang dengan rela dan ikhlas, serta mengorbankan nyawa untuk melahirkan dan mempertahankan tegaknya bangsa ini; mengapa karya-karya pemikiran dan gagasan-gagasan besar para pendahulu bisa tercipta dan mengantarkan kemerdekaan bangsa, bahkan mampu berlanjut dalam mengisi kemerdekaan seperti yang dinikmati kini; bagaimana seni budaya yang gemilang bisa tercipta oleh para pujangga, seniman dan budayawan Indonesia, sehingga menyentuh hati dan kecintaan untuk merasa memiliki dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia; betapa hati bergetar setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya; betapa bait-bait lagu kebangsaan membangkitkan perasaan yang dalam.

Rasanya setiap orang memiliki rasa kebangsaan, dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan ataupun pikiran, paling tidak dalam hati nuraninya. Dalam kenyataan, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tapi sulit dipahami. Namun, ada getaran hati dan resonansi pikiran tatkala rasa kebangsaan tersentuh dan terpanggil. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang ke orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat kekuatannya.

Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah mengonsepan pikiran wawasan kebangsaan Indonesia dalam pemikiran Kepulauan Nusantara. Pemikiran ini dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit seperti yang tersirat dalam Sumpah Palapa Gadjah Mada yang meyakini adanya kesatuan kehidupan di wilayah Nusantara. Pada awal abad ke-20 yang akan segera berakhir, Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memperlihatkan wawasan kebangsaan dalam tekad dan keinginan membangun persatuan dan kesatuan karena menyadari adanya kebinekaan dan keragaman budaya, agama, etnis, dan suku yang akhirnya menuju kepada perjuangan kemerdekaan nasional.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan. Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu paham yang disebut nasionalisme atau paham kebangsaan, yaitu pikiran-pikiran, yang bersifat nasional, bahwa suatu negara memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan tersebut, timbul semangat kebangsaan yang memiliki ciri khas, yaitu rela berkorban demi kepentingan tanah air, atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jatidirinya, serta mengem-

bangkan tata lakunya sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai luhur budayanya, yang lahir dan tumbuh subur sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Rasa kebangsaan merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d'être*) bangsa-bangsa di dunia. Masalah kebangsaan bukan monopoli sesuatu bangsa, dan bukan sesuatu yang unik dalam diri bangsa, karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.

Bagaimanapun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, pandangan kebangsaan suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dengan intens dan saling mempengaruhi. Dengan perbenturan budaya yang kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesisnya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat, yang kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan.

Memang pemikiran mengenai paham kebangsaan berkembang dari masa ke masa, dan berbeda dari satu lingkungan masyarakat ke lingkungan lainnya yang dicirikan oleh berbagai aliran atau haluan. Dalam sejarah bangsa-bangsa, dapat dilihat betapa banyak paham yang melandaskan diri pada kebangsaan. Ada yang menggunakan pendekatan ras atau etnis seperti nasional sosialisme (Nazisme) di Jerman, atas dasar agama seperti dipecahnya India dengan Pakistan, atas dasar ras dan agama seperti Israel-Yahudi, dan konsep Melayu-Islam di Malaysia, atas dasar ideologi atau atas dasar geografi atau paham geopolitik, seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut, antara lain mengatakan: "Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar; lautan Pasifik dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatra, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-

lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan".

Jika berbicara mengenai wawasan kebangsaan, memang kita perlu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, seorang Nasionalis besar, seorang negarawan yang berada pada peringkat dunia. Pada tahun 1926 dalam tulisannya *Nasionalisme, Islam, dan Marxisme*, Bung Karno mengatakan "Nasionalisme itu suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Memang semua paham nasionalisme yang berkembang, berpangkal tolak pada persatuan dan kesatuan suatu bangsa yang mengatasi paham golongan-golongan". Bung Karno lebih jauh lagi mencoba mengikatnya sehingga dapat menampung berbagai aliran dan ideologi, yang secara hakiki sebenarnya amat bertentangan. Pandangan ini menjadi paham yang dipegangnya sepanjang hidupnya. Paham ini pulalah yang kemudian berkembang tiga puluh tahun kemudian menjadi Nasakom.

Bung Hatta sebagai salah seorang proklamator tidak sepenuhnya sependapat dengan berbagai pandangan Bung Karno tersebut, terutama mengenai pendekatan geopolitik itu. Bung Hatta menyatakan: "Teori geopolitik sangat menarik, tetapi kebenarannya sangat terbatas. Kalau diterapkan kepada Indonesia, maka Filipina harus dimasukkan ke daerah Indonesia dan Irian Barat dilepaskan; demikian juga seluruh Kalimantan harus masuk Indonesia. Filipina tidak saja serangkai dengan kepulauan kita; bangsa Filipina bangga mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Melayu".

Memang, kata Bung Hatta, soal bangsa dan kebangsaan tidak begitu mudah memecahkannya secara ilmiah. Sukar memperoleh kriterium yang tepat apa yang menentukan "bangsa". Tidak dapat diambil sebagai kriteria: (1) persamaan asal; (2) persamaan bahasa; (3) persamaan agama. Atas dasar itu, Bung Hatta mengatakan: "Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita,

mujur yang sama ter tanam dalam hati dan otak".

Mengapa berbagai pandangan mengenai kebangsaan tersebut perlu digali? Hal ini tidak lain adalah untuk memberikan perspektif mengenai wawasan dan paham kebangsaan ini, terutama di dalam memasuki zaman baru. Pandangan-pandangan nasionalisme yang dikembangkan oleh para pendiri Republik ini, memang banyak bersumber dari berbagai teori pemikiran Barat. Pikiran-pikiran nasionalisme ini berkembang di Eropa, sebagai bentuk perlawanan terhadap feodalisme serta terhadap penjajahan oleh bangsa-bangsa yang kuat terhadap yang lebih lemah. Paham nasionalisme ini kemudian berkembang di bagian dunia lain, di Amerika, Asia, dan Afrika yang hidup di bawah tekanan kekuasaan feodal atau penjajah.

Namun, kalau dilihat lebih dalam lagi, dapat ditemukan pula pandangan-pandangan mengenai bangsa dan kebangsaan yang mencerminkan pandangan hidup khas Indonesia, seperti yang diutarakan Ki Hadjar Dewantara: "Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan yang hidup dalam jiwa dengan disengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu timbul dari *rasa diri*, yang terbawa dari keadaan perikehidupan, lalu menjalar menjadi *rasa keluarga*; rasa ini terus jadi *rasa hidup* bersama (rasa sosial)".

Wawasan Kebangsaan dan Tantangannya

Dalam memasuki zaman kehidupan yang makin mengglobal, wawasan kebangsaan banyak dibahas kembali. Tentu ada sesuatu di balik itu semua. Dengan mencoba mendalami, menangkap berbagai ungkapan dari masyarakat, terutama dari kalangan cendekiawan dan pemuka masyarakat, memang ada hal-hal yang menjadi keprihatinan. *Pertama*, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi terutama di kalangan generasi muda; sering kali disebut bahwa sifat materialistis, telah menggantikan idealisme yang merupakan sukmanya kebangsaan. *Kedua*, ada kekhawatiran ancaman desintegrasi kebangsaan, dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai negara, terutama yang amat mencekam

adalah kejadian di Yugoslavia, di bekas Uni Soviet, Sri Lanka, dan juga di negara-negara lainnya, seperti di Afrika yang paham kebangsaannya merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan. *Ketiga*, ada keprihatinan adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini.

Mengenai kekhawatiran yang pertama, memang bisa diperoleh banyak pandangan. Pada dasarnya gejala yang dikawatirkan itu sebenarnya lebih mencerminkan perkembangan gaya hidup. Cara berpakaian, lagu-lagu, makanan, bahasa, bahkan sikap sehari-hari sering kali mencerminkan gaya hidup internasional, terutama di perkotaan. Peningkatan taraf hidup, globalisasi dan arus informasi menyebabkan terjadinya hal itu. Apakah makin terintegrasinya Indonesia kepada pola kehidupan dan ekonomi dunia merupakan ancaman yang mendasar terhadap rasa kebangsaan? Hal ini sulit untuk dapat dibuktikan. Ujiannya nanti adalah seberapa jauh bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, merasa terpenggil dan bereaksi ketika bangsa dan negaranya berada dalam ancaman. Namun, yang juga bisa menjadi ujian sekarang ini adalah seberapa jauh bangsa Indonesia dapat mengembangkan semangat menghargai dan mendahulukan karya bangsa sendiri sebagai ungkapan nasionalisme atau patriotisme baru.

Kekhawatiran yang kedua yang juga perlu mendapat perhatian adalah terutama mengenai adanya gejala mempertentangkan berbagai perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat majemuk, sangat bineka. Karena itu ada Sumpah Pemuda. Karena itu ada semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Sejarah telah menunjukkan betapa kemajemukan itu dapat mendorong divergensi yang dengan susah payah telah diatasi sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh. Upaya ini dilakukan sejak awal kemerdekaan, yaitu dengan diterimanya perubahan Piagam Jakarta, menjadi apa yang dikenal dalam UUD 1945 sekarang.

Di pihak lain, di samping ada potensi divergensi, kemajemukan atau kebinekaan juga merupakan potensi kekuatan yang besar bagi suatu bangsa. Adanya unsur-unsur yang

berbeda jika dapat dihipunkan akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar, daripada hanya terdiri atas unsur yang seragam. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya dan tidak mencerminkan pandangan kebangsaan, untuk menutup mata akan adanya perbedaan dan bertindak seakan-akan bangsa Indonesia adalah homogen, tidak ada perbedaan suku, agama atau etnis. Dan bukan itu pula pengertian kebangsaan yang dikehendaki pendiri Republik ini. Di pihak lain, sangat bertentangan pula dengan rasa kebangsaan untuk memperbesar perbedaan. Sesungguhnya, sangat penting mengenali adanya kemajemukan, dan memadukan serta memanfaatkannya untuk membangun kekuatan yang dahsyat untuk mewujudkan cita-cita perjuangan.

Kekhawatiran yang ketiga, tidak terlepas dari kedua hal di muka. Kesadaran masyarakat yang makin meningkat, sebagai hasil pembangunan menyebabkan tumbuhnya sikap kritis. Keterbukaan yang dihasilkan oleh pembangunan politik membuat segala pandangan dapat dikemukakan secara bebas. Dengan sendirinya terjadi pula interaksi yang makin leluasa dan kerap dengan pandangan-pandangan dari luar. Akibatnya, timbul berbagai jargon politik, yakni "demokratisasi", "arus bawah" dan sebagainya, yang sebetulnya merupakan rumusan-rumusan netral, kalau tidak dimuati dengan konotasi tertentu. Keinginan untuk membangun kehidupan nasional yang partisipatif dan demokratis, adalah wajar, dan menjadi tujuan pembangunan politik. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana mewujudkannya. Ada kekhawatiran, dalam proses itu berkembang pemikiran-pemikiran yang asing, yang mungkin tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, bahkan akan bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, terkesan bahwa perubahan menuju arah kehidupan yang makin bebas sepertinya boleh dicapai dengan menghalalkan segala cara dan asal berbeda.

Sesungguhnya tidak ada orang yang menentang pembaharuan, bahkan hal itu diamanatkan oleh UUD 1945, seperti semangat yang dapat ditangkap pada penjelasan Pasal 3. Namun, pembaharuan itu harus dilakukan di dalam sistem itu sendiri.

Pembaharuan di luar sistem, akan menyebabkan gejolak, yang tidak menguntungkan siapa pun, yang tidak bisa menghindar dari dampak gejolak itu.

Pengamalan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Masa Depan

Dari uraian di atas, pertanyaan yang muncul adalah konsep kebangsaan yang bagaimana yang tepat untuk masa kini dan masa depan bangsa. Karena persoalan feodalisme dan kolonialisme, yaitu musuh-musuhnya nasionalisme, sudah tidak relevan lagi sekarang, tentu wawasan kebangsaan harus ditunjukkan dengan wujud baru.

Dalam hal ini, meskipun penampilannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi suatu bangsa juga berubah, tetapi pengertian pokoknya tidak pernah berubah seperti apa yang telah diuraikan pada awal pembahasan ini.

Dengan mengupas berbagai pandangan tadi, maka dapat dikatakan bahwa hakikat wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia adalah yang termaktub di dalam jiwa pembukaan UUD 1945, yang menetapkan dasar dan tujuan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa paham kebangsaan Indonesia dicerminkan dalam sila Persatuan Indonesia. Meskipun persatuan merupakan unsur paling pokok dalam setiap paham kebangsaan, tetapi bukan merupakan unsur satu-satunya. Konsep kebangsaan menurut paham bangsa Indonesia lebih luas daripada hanya unsur persatuan. Karena kalau hanya itu saja, ia menjadi sangat terbatas, dan kalau sudah menjadi satu lantas tidak diperlukan lagi. Paham kebangsaan bangsa Indonesia mengemban misi, yaitu seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan, "*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam*".

Paham kebangsaan Indonesia adalah paham yang memiliki landasan spiritual, moral dan etik, karena itu bersilakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia ingin membangun masa kini dan masa depan, di dunia dan akhirat. Paham kebangsaan Indo-

nesia tidak menempatkan bangsa Indonesia di atas bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia mempunyai unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu pula paham kebangsaan Indonesia mengakui adanya nilai-nilai universal kemanusiaan. Sebagai bangsa yang majemuk, tetapi satu dan utuh, paham kebangsaan Indonesia jelas bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan ini kemudian dituangkan dan dimantapkan dalam konsep Wawasan Nusantara. Paham kebangsaan ini berakar pada asas kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia adalah paham demokrasi, dan bertentangan dengan paham totaliter. Paham kebangsaan ini memiliki cita-cita keadilan sosial, bersumber pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengan pandangan itu, wawasan kebangsaan tidak lagi hanya dilihat sebagai wujud yang reaktif terhadap sesuatu keadaan atau ancaman, atau kekhawatiran terhadap "ini" atau terhadap "itu". Wawasan kebangsaan Indonesia sebaiknya merupakan pandangan proaktif, untuk membangun bangsa menuju perwujudan cita-citanya.

Dengan demikian *pembangunan sebagai pengamalan wawasan kebangsaan*, tidak lain adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang merupakan konsepsi pembangunan yang paling mendasar. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pembangunan sebagai

pengamalan Pancasila, kita tidak perlu jauh-jauh mencari, tetapi mempelajari saja GBHN, karena petunjuk-petunjuknya telah jelas. GBHN 1993 memberikan tuntunan, bahwa berdasarkan pokok pikiran pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.

Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik. Mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanaan pemilu secara teratur selama Orde Baru juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi.

Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan yang telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan, yaitu era Kebangkitan Nasional Kedua.

2. Dimensi Akhlak dalam Pembangunan Nasional

Akhlak adalah nilai-nilai dasar yang membimbing seseorang dalam berperilaku. Seorang dikatakan berakhlak atau bermoral, apabila perilakunya mengikuti kaidah-kaidah kehidupan yang dikehendaki atau dibenarkan oleh agama, masyarakat, dan hati nuraninya. Kaidah-kaidah kehidupan itu berisi tuntunan atau petunjuk mengenai baik dan buruk. Karena perjalanan kehidupan pada dasarnya adalah rangkaian pilihan yang sambung-menyambung, tidak henti-hentinya, maka akhlak menunjukkan pilihan-pilihan yang baik dalam berperilaku dan menempuh kehidupan.

Moral atau akhlak, tidak dapat diukur semata-mata oleh diri sendiri, tetapi oleh lingkungan dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pada dasarnya, akhlak berkenaan dengan

perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang hidup sendiri, tanpa orang lain, maka masalah akhlak menjadi kurang menjadi persoalan, karena perbuatan yang dilakukan hanya

menyangkut dirinya sendiri. Karena itu akhlak berkenaan tidak hanya dengan nilai-nilai individual, tetapi terkait dengan nilai-nilai sosial dan bersifat transendental.

Oleh karena itu, seseorang dikatakan berakhlak apabila perilakunya baik, yakni tidak bertentangan dengan norma-norma yang dipandang baik oleh masyarakat. Norma-norma masyarakat itu sendiri dibentuk oleh keyakinan yang dianut oleh masyarakat tempat seseorang menjadi anggotanya. Bagi masyarakat beragama, ajaran-ajaran agama adalah nilai-nilai yang paling hakiki yang membentuk norma-norma masyarakat itu. Bagi umat beragama akhlak adalah cerminan dari pengejawantahan keimanan.

Seseorang yang berperilaku amat baik, artinya tidak pernah melanggar kaidah-kaidah yang menjadi pegangan terhadap hal-hal baik, dikatakan berakhlak mulia, yang dalam agama Islam dikenal dengan *akhlaqul karimah*. Akhlak berbeda dengan watak, karena watak adalah sifat atau kecenderungan pembawaan seseorang. Oleh karena itu, tidak ada akhlak yang buruk, tetapi ada watak yang buruk. Orang yang perilakunya terus-menerus buruk, disebut orang yang wataknya buruk, tidak berakhlak atau tidak bermoral, atau *a moral*.

Akhlak dalam Pembangunan

Dalam kaitan akhlak dengan pembangunan nasional, pertanyaan yang segera muncul adalah, pembangunan yang bagaimana yang berakhlak? Pembangunan pada umumnya diarahkan untuk memperbaiki keadaan, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan kebaikan. Namun, sejarah menunjukkan tidak senantiasa demikian kenyataannya.

Pembangunan dapat merupakan perbuatan yang tidak baik, apabila hal-hal berikut yang terjadi.

Pertama, jika ditujukan untuk kepentingan pembangunan suatu kelompok dengan mengorbankan yang lain. Contohnya, adalah pembangunan kembali Jerman dari reruntuhan perang dunia pertama, dengan

menempatkan kelompok etnisnya di atas yang lain.

Kedua, apabila pembangunan hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi tidak bermanfaat bagi banyak yang lain. Contohnya, banyak pembangunan di negara berkembang yang mengakibatkan kemajuan hanya bagi kelompok atau lapisan tertentu yang sedikit jumlahnya, sedangkan yang lainnya tidak berkesempatan untuk turut serta atau menikmatinya. Pembangunan yang demikian acapkali menghasilkan atau mengabadikan kemiskinan bagi lapisan rakyat yang terbanyak.

Ketiga, apabila pembangunan dijalankan dengan menggunakan cara yang tidak benar, tidak baik, atau tidak halal. Pembangunan yang menghalalkan segala cara bukan pembangunan yang benar dari tinjauan akhlak.

Keempat, pembangunan yang hanya mengejar kebutuhan lahiriah dan mengabaikan sisi rohaniah manusia, sebagai makhluk yang utuh. Pembangunan yang demikian menghasilkan manusia yang materialistis, yang segala perbuatannya hanyalah untuk kepuasan di dunia ini saja.

Kelima, pembangunan yang merusak alam dan lingkungan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, memikul tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidupnya, baik lingkungan sosial maupun alam. Merusak alam sekarang berarti menyengsarakan generasi mendatang.

Keenam, pembangunan yang dijalankan dengan tidak memperhatikan nilai kemanusiaan pada umumnya. Misalnya, pembangunan melalui penjajahan dan penindasan. Akhlak atau moral selalu sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Karena itu, pembangunan yang bermoral adalah pembangunan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang fitrah.

Pembangunan menurut Paham Bangsa Indonesia

Pokok yang paling mendasar dalam falsafah pembangunan bangsa Indonesia ialah bahwa pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Karena itu GBHN menyatakan bahwa keseluruhan semangat,

arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka pembangunan dalam pengertian bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional menurut pokok-pokok pikiran di atas, ada sembilan asas pembangunan yang harus diterapkan dan dipegang teguh seperti yang diamanatkan GBHN 1993. Asas-asas tersebut mencerminkan kaidah-kaidah yang paling pokok yang membentuk moral pembangunan bangsa Indonesia. Asas-asas tersebut adalah (1) asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) asas manfaat; (3) asas demokrasi Pancasila; (4) asas adil dan merata; (5) asas keseimbangan; (6) asas hukum; (7) asas kemandirian; (8) asas kejuangan; dan (9) asas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di urutan paling atas, ditempatkan asas keimanan dan ketaqwaan. Dengan asas ini bangsa Indonesia menyatakan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etis dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut menunjukkan watak pembangunan yang dikehendaki dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Kaidah Penuntun sebagai Norma Pembangunan

Bagaimana menyelenggarakan pembangunan yang mencerminkan sifat-sifat seperti tersebut di atas, telah pula diberikan pedomannya oleh GBHN dalam sepuluh butir Kaidah Penuntun, yang meliputi semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Khususnya di bidang ekonomi, Kaidah Penuntun menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.

Dalam Kaidah Penuntun ditunjukkan delapan hal yang menjadi ciri demokrasi ekonomi yang harus ditegakkan dan diwujudkan melalui upaya pembangunan, dan tiga hal yang harus dihindari karena bertentangan dengan watak perekonomian Pancasila. Ciri demokrasi ekonomi dan tiga hal yang harus dihindari tersebut diuraikan secara singkat di bawah ini, yang memberikan rambu-rambu moral pembangunan bangsa Indonesia.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Butir ini dipetik dari pasal 33 UUD 1945. Ini merupakan dasar demokrasi ekonomi yang menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang. UUD 1945 menunjukkan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Dengan demikian, perekonomian yang semata-mata didasarkan kepada mengejar keuntungan untuk diri sendiri dan sifat keserakahan amat bertentangan dengan kaidah ini. Asas kekeluargaan mengamankan semangat senasib sepenanggungan yang tercermin dalam solidaritas sosial. Majikan dan buruh, yang besar dan yang kecil haruslah hidup dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada hamba sahaya dan tidak ada tinas-menindas dan mati-

mematikan. Apa yang ada adalah tenggang rasa, nikmat sama dirasakan, penderitaan sama dipikul. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan.

2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

Ini merupakan ayat kedua pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasannya diingatkan jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Apa yang dimaksud dengan yang berkuasa, tentunya bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik saja, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar dan faktor-faktor produksi. Karena itu hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ditangani orang seorang. Penguasaan oleh negara memang tidak perlu diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi bahwa negara harus menjamin adanya kemampuan bagi negara untuk menegakkan kedaulatan serta melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat. Kedaulatan termasuk di bidang ekonomi tidak boleh bergeser ke tangan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab kepada dan tidak berada di bawah pengawasan rakyat karena kedaulatan di negara Indonesia berada di bawah pengawasan rakyat atau di tangan rakyat, yang pengejawantahannya dilakukan melalui mekanisme perwakilan.

3. *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Butir ini adalah ayat ketiga pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Allah bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan

alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan orang per orang atau usaha swasta, tetapi harus tetap dalam pengawasan pemerintah dan penilikan masyarakat. Dalam kaitan ini, potensi kekayaan alam dikembangkan dengan cara yang dapat memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga menjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

4. *Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat.*

Butir ini mencerminkan amanat pasal 23 UUD 1945. Di sini ditegaskan kedaulatan rakyat terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kekayaan dan keuangan negara pada umumnya. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Dengan memiliki hak anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi (mengontrol) pemerintah. Selain menegakkan hakikat kedaulatan rakyat dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, menunjukkan juga sifat demokratisnya.

5. *Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi sesuai dan seimbang dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal.*

Kaidah ini memberi petunjuk mengenai pemerataan pembangunan antardaerah dan kewajiban negara untuk mendorong pembangunan wilayah-wilayah yang terbelakang seperti misalnya kawasan timur Indonesia. Pembangunan yang makin merata antardaerah tidak hanya akan memenuhi tuntutan keadilan, tetapi akan memper-

kukuh landasan pembangunan, karena berkembangnya potensi-potensi pembangunan yang ada di semua daerah sehingga menghasilkan sinergi yang akan mendorong pertumbuhan.

6. *Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Butir ini adalah bagian dari hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 pada Bab X, pasal 26, 27, 28, 29 dan 30, dalam hal ini khususnya pasal 27 ayat (2). Di sini dijamin bahwa rakyat tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak dikehendakinya. Aspek yang lebih mendasar lagi bahwa negara wajib meng-upayakan pekerjaan bagi rakyat dan membangun perikehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya memang menjadi tugas dan pokok perhatian pemerintah mana pun di dunia, demikian pula menjamin penghidupannya yang layak. Keseluruhan upaya pembangunan bangsa pun, apabila dipadatkan, ke sinilah arahnya. Demikian pula upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan, karena adanya kemelaratan di tengah kemakmuran sangat bertentangan dengan hati nurani dan rasa keadilan. Selain itu, rakyat yang miskin bukan pula rakyat produktif sehingga mengatasi kemiskinan, selain merupakan persoalan kemanusiaan adalah juga masalah ekonomi.

7. *Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.*

Hak milik perorangan memang dijamin oleh negara. Dengan jaminan itu, ada perangsang bagi setiap orang untuk memperbesar kegiatan yang produktif, yang dapat pula bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Namun, hak milik perorangan tidak bersifat mutlak, dalam arti dapat digunakan sesukanya. Pembatasannya adalah kepentingan umum. Pemanfaatan hak milik perorangan tidak boleh merugikan masya-

rakat, bahkan sebaliknya harus diusahakan untuk menguntungkan selain dirinya sendiri juga masyarakat. Dalam paham bangsa, hak milik perorangan diharapkan pula mempunyai nilai dan fungsi sosial.

8. *Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.*

Menyadari betapa sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan, maka potensi, inisiatif, dan daya kreasinya harus terus menerus didorong dan dirangsang untuk dikembangkan. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa-bangsa terkait erat dengan dorongan dan kebebasan untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitas yang tercermin dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membawa bangsa pada tataran peradaban yang lebih tinggi. Untuk itu memang harus diusahakan adanya perangsang, baik dalam bentuk kenikmatan hasilnya ataupun penghargaan masyarakatnya. Namun, moralnya adalah kebebasan berprakarsa dan berkreasi itu tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Egoisme pribadi, keangkuhan intelektual, dan pelecehan terhadap nilai-nilai budaya serta martabat anggota masyarakat harus dihindari.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa demokrasi ekonomi pada prinsipnya menjamin hak-hak warga negara, disertai pembatasannya, yang pada dasarnya adalah upaya mencari keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakatnya.

Kaidah Penuntun juga mengajarkan adanya tiga hal yang mutlak harus dihindari dan tidak boleh terjadi pada bangsa ini. Ketiga hal itu adalah musuh demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila.

a. *Sistem “free-fight liberalism”*

Sistem ini menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan

struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Sistem ini memang terkait dengan sistem ekonomi pasar yang terbukti merupakan mekanisme yang lebih unggul dibandingkan mekanisme lainnya yang juga telah dicoba, antara lain dengan sistem Marxisme/komunisme atau sistem ekonomi komando dalam berbagai bentuk dan variasinya. Perdagangan bebas sebetulnya adalah mekanisme yang berkembang dalam sistem ini. Namun, melalui pengalaman lebih dari dua abad, sistem kapitalisme liberal, telah mengalami cukup banyak perubahan, karena dalam perjalanannya ditemukan banyak kelemahan. Kelemahan itu, adalah antara lain, terjadinya distorsi dalam penyediaan barang dan jasa publik, terciptanya persaingan yang tidak seimbang karena terakumulasinya kekuatan pasar pada sejumlah orang atau kelompok yang terbatas, alokasi sumber daya terjadi secara tidak efektif dan optimal, dan terjadinya kesenjangan dalam pendapatan yang pada gilirannya melahirkan masalah-masalah sosial. Sistem ini juga melahirkan keserakahan dan kebuasan dalam persaingan yang merangsang penjajahan dan penghisapan satu bangsa atas bangsa lain, semata-mata untuk menguasai pasar dan faktor-faktor produksi secara lebih murah sehingga dapat memperkuat daya saing. Di negara-negara maju, sistem ini telah “dijinakkan” dengan berbagai intervensi dari negara melalui pembatasan-pembatasan. Tindakan yang sangat menonjol adalah ketentuan-ketentuan *anti-trust*, serta pengaturan redistribusi pendapatan untuk menolong golongan yang dirugikan dalam persaingan pasar tersebut. Di banyak negara, perlindungan diberikan kepada usaha kecil sehingga dapat memasuki persaingan pasar secara lebih kuat. Dengan demikian, di negara Barat pun, yang pertama-tama menerapkan sistem ini, persaingan bebas atau *free-fight liberalism* sudah diupayakan untuk dihindari. Apalagi tentunya di Indonesia yang sejak semula memang tidak mengatakan dirinya sebagai penganut paham ini.

b. Sistem etatisme

Dalam sistem ini negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya

kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dari pengalaman bangsa Indonesia sendiri dan pengalaman bangsa-bangsa lain, diketahui bahwa sistem ini tidak mampu mengelola sumber daya dan kekayaan negara secara efisien, efektif dan optimal, karena tidak berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat dapat lebih mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi dibandingkan dengan jika negara yang melakukannya. Oleh karena itu, selayaknya negara membatasi keterlibatannya secara langsung dalam hal yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak saja, dan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri seluas atau sebaik seperti apabila dilakukan oleh pemerintah, atau yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak ada rangsangan ekonomi bagi masyarakat untuk melakukannya sendiri.

c. Persaingan tidak sehat

Persaingan dianggap tidak sehat bila terjadi pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Seperti telah dikemukakan di atas, mekanisme pasar harus disertai dengan pengendalian agar persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sehat yang mencerminkan keadilan. Monopoli dan monopsoni, juga oligopoli dan oligopsoni, adalah produk mekanisme pasar yang melencong, yang terjadi karena tidak ada atau kurang efektifnya kendali yang mencegah terjadinya penguasaan kekuatan pasar pada orang atau kelompok yang jumlahnya terbatas. Gejala ke arah itu jelas harus dihindari karena selain menyebabkan distorsi pasar yang akan merugikan rakyat banyak, juga bertentangan dengan pesan konstitusi bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.

Selanjutnya, harus diingat bahwa pembangunan bukan hanya di bidang ekonomi. Selain kaidah-kaidah yang menunjang pembangunan ekonomi, GBHN 1993 juga meletakkan kaidah-kaidah pembangunan di bidang-bidang lainnya. Apa yang ingin dibangun adalah kehidupan yang

konstitusional, demokratis, dan berdasarkan hukum. Pembangunan yang dilaksanakan adalah yang bermoral, berakhlak, berdasarkan pada kesepakatan bersama mengenai dasar-dasar negara yang merupakan landasan dalam membangun kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dasar-dasar itu adalah konstitusi. Perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, meskipun atas nama pembangunan, tidak dikehendaki.

Pembangunan harus juga dilakukan dengan asas demokrasi, karena negara adalah milik rakyat, dan segala sesuatu yang dilakukan untuk dan atas nama negara, termasuk pembangunan, haruslah dengan persetujuan rakyat, dan pelaksanaannya mengikutsertakan rakyat, serta hasilnya dinikmati rakyat seluruhnya.

Pembangunan juga harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan dengan menghormati hukum. UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Meskipun untuk pembangunan, segala kegiatan tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuasaan, tetapi harus berdasarkan hukum. Karena itu pembangunan yang bertentangan dengan amanat konstitusi atau yang tidak dilakukan secara demokratis, atau yang melanggar hukum, bukanlah pembangunan yang bermoral atau berakhlak.

Pelaksanaannya

Dari berbagai uraian di atas, kiranya dapat diperoleh gambaran mengenai akhlak pembangunan dan pembangunan yang berakhlak, dari sudut pandang bangsa Indonesia. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Jika sudah sampai di situ, tentu pandangan yang ada dalam masyarakat dapat berbeda-beda. Fakta-fakta menunjukkan bahwa keadaan bangsa Indonesia hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Artinya apa yang dicita-citakan, dan dirumuskan dalam rencana-rencana, telah dijalankan dan telah memberikan hasil.

Artinya, diyakini bahwa dalam garis besarnya pembangunan nasional yang dilaksanakan berada di jalan yang benar. Namun, disadari masih banyak kelemahan atau ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan yang terjadi.

Keadaan itu dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut ini.

Pertama, ada kekeliruan dalam kebijaksanaan atau pendekatan. Ini mungkin saja terjadi, karena bagaimanapun upaya pembangunan ini acapkali dilaksanakan secara berjalan sambil belajar. Jadi, tidak tertutup kemungkinan ada jalan-jalan salah yang dipilih. Semestinya begitu diketahui salah, harus segera diperbaiki.

Kedua, kebijaksanaannya benar, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan seperti atau menghasilkan apa yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena ada rintangan yang sulit diatasi, atau terjadi perkembangan yang di luar perhitungan atau rencana.

Ketiga, sejak semula memang pelaksanaannya menyimpang, yang dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena ketidakmampuan yang melaksanakan. Ini bersangkutan dengan kualitas sumber daya manusianya yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul. Kedua, karena ada itikad buruk yang biasanya untuk keuntungan diri sendiri, misalnya korupsi, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya.

Karena dunia bukan tempat yang ideal, dan tidak dimaksudkan Tuhan juga sebagai tempat yang serba baik, maka tantangan serupa itu akan terus dihadapi betapapun kemajuan yang telah dicapai. Banyak negara lain, yang sudah sangat maju sekalipun, masih menghadapi masalah yang sama. Menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi sekecil-kecilnya agar pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan moral pembangunan bangsa Indonesia.

3. Kepemimpinan dalam Wawasan Kebangsaan

Faktor kepemimpinan penting sekali dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya masyarakat, jatuh banggunya bangsa, ditentukan oleh pemimpinnya. Pemimpinlah yang akan merancang masa depan serta menggerakkan masyarakat untuk mencapainya. Banyak teori mengenai kepemimpinan. Juga banyak pendekatan untuk bisa memahami kepemimpinan. Dalam topik ini akan dibahas beberapa pandangan terutama mengenai corak kepemimpinan masa depan, yakni kepemimpinan yang dapat membawa bangsa menuju kemajuan yang berkeadilan di atas landasan kebangsaan.

Warisan para Leluhur

Bangsa Indonesia memiliki warisan dari para leluhur mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan. Banyak di antaranya yang relevan sepanjang masa dan sekarang pun masih digunakan.

Salah sebuah konsep kepemimpinan yang merupakan warisan kebudayaan bangsa adalah **Hastha Brata**, atau delapan ajaran keutamaan, seperti yang ditunjukkan oleh sifat-sifat alam.¹ Seorang pemimpin harus berwatak **matahari**, artinya memberi semangat, memberi kehidupan dan memberi kekuatan bagi yang dipimpinnya. Harus mempunyai watak **bulan**, dapat menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan. Memiliki watak **bintang**, dapat menjadi pedoman. Berwatak **angin**, dapat melakukan tindakan secara teliti dan cermat. Harus berwatak **mendung**, artinya bahwa pemimpin harus ber wibawa, setiap

tindakannya harus bermanfaat. Pemimpin harus berwatak **api**, yaitu bertindak adil, mempunyai prinsip, tegas tanpa pandang bulu. Ia juga harus berwatak **samudera**, yaitu mempunyai pandangan luas, berisik dan rata. Akhirnya seorang pemimpin harus memiliki watak **bumi**, yaitu budinya sentosa dan suci.

Ki Hadjar Dewantara merumuskan kepemimpinan sosial dengan tiga ungkapan yang sangat dalam maknanya: *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*.²

Apabila ditelaah secara dalam, pesan-pesan leluhur tadi serta asas-asas kepemimpinan yang telah dimiliki itu mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang berlaku di segala zaman. Ini merupakan contoh dari nilai-nilai tradisional yang tidak

¹ Hastha Brata adalah ajaran tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang disampaikan oleh Sri Rama kepada Bharata, adiknya, yang akan menjadi Raja Ayodhya. Ini diceritakan dalam *Ramayana Kakawin* (cerita berbentuk puisi dalam bahasa Jawa Kuno dari abad ke-10), yaitu ketika Rama harus meninggalkan istana untuk mengembara di hutan bersama Laksmna, adiknya, dan Dewi Shinta, istrinya. Atas permintaan ayahnya, Dastharata, Raja Ayodhya, Rama harus mengembara di hutan dahulu sebelum boleh menggantikannya. Di hutan itulah, ia kehilangan Dewi Shinta karena mengejar Kijang Kencana, alat tipuan Dasamuka.

² Ini diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam berbagai kesempatan berpidato kepada anak-anak didiknya serta para pengasuh di Perguruan Taman Siswa yang dibangunnya pada masa penjajahan Belanda. Tiga prinsip kepemimpinan itu bermakna bahwa “seorang pemimpin harus berada di depan yang dipimpinnya untuk menjadi teladan, di tengah-tengah untuk membangun semangat (kemauan), dan mengikuti dari belakang untuk memberi kekuatan (daya)”. Kata-kata itu dikutip oleh Ki Hadjar dari Drs. Raden Mas Sosrokartono (saudara kandung Raden Adjeng Kartini) yang bunyi aslinya adalah: *Ing ngarso asung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*.

bertentangan dengan nilai-nilai modern dan tidak lapuk dan lekang oleh gelombang perubahan apa pun. Ini merupakan sifat-sifat kepemimpinan yang universal, yang berintikan suatu nilai bahwa sang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberikan keyakinan kepada yang dipimpinnya. Yang dipimpin harus merasakan kemanfaatan dari kepemimpinannya. Dengan demikian kepemimpinannya akan efektif, dan yang dipimpin dapat menerimanya dengan taat dan ikhlas.

Berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan seperti itu pada dasarnya bagi bangsa Indonesia seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat, yaitu:

Pertama, ia harus memiliki idealisme, artinya jelas ke mana atau ke arah mana ia ingin membawa yang dipimpinnya.

Pemimpin harus memahami apa yang menjadi tujuan perjuangan,³ dan menempatkan kepentingan perjuangan dan masyarakat yang dipimpinnya di atas kepentingannya sendiri. Ia harus memiliki komitmen kepada tujuan perjuangan itu dan senantiasa berupaya untuk mencapainya. Bagi bangsa Indonesia tujuan perjuangan itu jelas. Ia lahir bersama kemerdekaannya.

Sifat bangsa Indonesia yang majemuk membuat pemimpin harus mampu menjadi pemersatu. Dalam hal kepemimpinan kebangsaan seorang pemimpin harus menjadi pemimpin bangsa, bukan hanya mementingkan kelompok yang dipimpinnya atau suatu bagian dari bangsa. Seorang pemimpin di Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan.

Kedua, ia harus memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efektif membawa yang dipimpin ke arah tujuan yang “diidealkannya”. Ia harus mengetahui cara memimpin dan menguasai bidang atau tugas dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan demikian, ia harus seorang profesional. Ini berarti bahwa seorang pemimpin, bukan hanya mengerti teknik kepemimpinan, tetapi juga menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

³ Kalau dipahami hakikat pembangunan sebagai perjuangan.

Ketiga, seorang pemimpin harus menjadi teladan, dan sumber inspirasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa, karena hanya di atas iman dan taqwa, pembangunan yang berakhlak dapat diselenggarakan. Pemimpin juga harus memahami dan menghayati budaya bangsanya.⁴

Ajaran leluhur dan doktrin kepemimpinan yang telah diungkapkan di atas mencakup sifat pertama dan ketiga, bahkan juga sebagian sifat kedua, yaitu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin.

Dengan demikian, masalahnya menjadi lebih sederhana. Bukan doktrin atau asasnya yang masih harus dicari tetapi **kualitas** pemimpin dan kepemimpinan itu yang perlu di kembangkan, agar mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan.

Kepemimpinan Masa Depan

Bangsa Indonesia tidak dapat mengharapkan selalu dapat memperoleh pemimpin yang besar seperti Bung Karno dan Pak Harto, yang mempunyai kapasitas individu dan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, dan tampil bersama dengan peran yang historis dan teramat menentukan dalam perjalanan bangsa. Namun, dari kedua beliau itu, kita dapat belajar mengenai bagaimana sosok pemimpin bangsa yang tepat untuk masanya.

Dari sudut pandang ini, maka pertama-tama pemimpin masa depan tidak mungkin bersandar semata-mata kepada kharisma, baik dari pembawaan, karena peran sejarah, atau dibuat secara sintesis. Kelebihan seorang pemimpin akan diukur dari prestasi nyata dan kualitas pemikirannya oleh masyarakat dan orang-orang yang setara (*equal*)

⁴ Dalam kepemimpinan perusahaan, banyak perusahaan multinasional yang mengharuskan para eksekutifnya untuk mengikuti “*cross-cultural training*”. Bahkan dalam pembahasan teori-teori kepemimpinan, kebudayaan suatu bangsa merupakan suatu variabel *contingency* yang sangat penting untuk diperhatikan.

dengannya. Para pemimpin nantinya mungkin tidak berbeda terlalu lebih dari yang lain.

Namun, pemimpin yang dituntut adalah yang berjiwa kerakyatan, dan sadar bahwa kepemimpinannya adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh yang dipimpin dan harus dipertanggungjawabkannya. Tidak mungkin lagi seorang pemimpin pada masa kini dan masa mendatang merasa kepemimpinan itu sebagai haknya, entah karena keturunan, kekayaan, atau kepintarannya.

Para pemimpin masa depan akan memimpin rakyat yang makin luas dan dalam pengetahuannya, yang makin paham akan hak-haknya dan makin menjaga martabat, dan kepentingannya. Maka pemimpin tidak lagi bisa mengandalkan kepada kekuatan fisik, seperti di masa awal di banyak negara berkembang, tetapi harus lebih kepada kekuatan moral dan intelektual. Pemimpin masyarakat modern harus siap memimpin secara demokratis, karena kehidupan demokrasi adalah senafas dengan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian pemimpin yang diperlukan, dan yang paling akan berhasil memimpin, adalah pemimpin yang berjiwa demokrat, dan bukan yang otoriter. Pemimpin yang tegas bukan harus pemimpin yang otoriter, tetapi justru yang mampu meyakinkan yang dipimpinnya akan kebenaran arah yang akan ditempuh.

Masyarakat akan makin canggih, dan tuntutan kepada pemimpinnya akan makin canggih pula. Masyarakat memilih pemimpin yang punya wawasan ke masa depan. Karena masa depan sangat padat teknologi, maka seorang pemimpin tidak boleh merasa asing terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Hal ini tidak berarti seorang pemimpin harus seorang ilmuwan (*scientist*). Yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus memiliki apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan peran teknologi sebagai unsur yang sangat pokok dalam membentuk kehidupan masa depan.

Dalam suasana kehidupan yang makin rumit, menentukan pilihan yang paling baik menjadi makin sulit. Maka kearifan sangat diperlukan, lebih daripada di masa lalu, untuk menentukan mana yang terbaik, atau mana yang paling kurang buruk di antara

alternatif-alternatif yang buruk. Di samping kearifan, diperlukan pula suatu tingkat pemahaman teknis, agar keputusan yang menyangkut implikasi yang kompleks tidak diambil semata-mata atas dasar intuisi, seperti dalam banyak masyarakat tradisional, tetapi dengan dasar pengetahuan dan perhitungan yang matang.

Karena masyarakat akan lebih terbuka, dan kebebasan akan menjadi ciri masyarakat masa depan sebab kebebasan diperlukan untuk mengembangkan kreativitas, maka untuk mencapai konsensus akan makin pelik. Kembali diperlukan kearifan dari pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat, yang tidak selalu mendapat dukungan orang banyak.

Perkembangan ekonomi dunia serta persaingan yang makin tajam, membuat pemimpin bangsa di masa depan, harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata hubungan internasional dan mengenai bekerjanya mekanisme ekonomi dunia. Para pemimpin bangsa nanti harus memiliki kemampuan untuk membawa bangsa ini memenangkan persaingan yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Tidak ada bangsa yang dapat mengisolasi diri dan yang tidak tergantungan kepada hubungan internasional. Pemimpin modern dengan demikian harus mempunyai minat dan pengetahuan yang cukup mengenai hal ikhwal yang terjadi di luar batas kepentingan bangsanya sendiri yang langsung. Ia harus memiliki jiwa kemanusiaan dan perhatian (*concern*) terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Para pemimpin masa depan harus mampu memelihara kedaulatan dan kehormatan bangsa di antara masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Selain kekuatan yang dimiliki suatu negara baik dalam bidang politik, ekonomi atau militer, kualitas kepemimpinan suatu bangsa juga mempengaruhi martabatnya dalam pergaulan internasional.

Secara keseluruhan pemimpin masa depan adalah pemimpin yang harus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Kemajuan dan kemandirian ini harus menjadi landasan serta modal untuk membangun bangsa yang adil

dan makmur, yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Singkatnya, kepemimpinan modern, di samping memiliki sifat-sifat tradisional yang melambangkan moral kepemimpinan bangsa, juga harus merupakan sosok modern. Pemimpin yang demikian adalah seorang yang memiliki jiwa kerakyatan, seorang yang profesional, memiliki wawasan, inovatif dan rasional. Ia harus mampu memahami masalah-masalah yang kompleks, dan mampu menemukan pemecahan yang sederhana dan mudah dilaksanakan bagi masalah-masalah yang kompleks itu. Ia bukan hanya harus berani mengambil risiko, tetapi juga mampu menghitung risiko.

Bagaimana bisa menemukan pemimpin serupa itu, itu suatu persoalan

yang harus bisa dijawab. Seperti dikatakan tadi, pemimpin bisa dibuat. Bahkan acapkali dikatakan pemimpin adalah cerminan masyarakatnya (*you deserve your leader*), atau pemimpin adalah "produk budaya" masyarakatnya. Maka sungguh penting menanam lahan yang subur dari sejak sekarang untuk menumbuhkan bibit-bibit kepemimpinan seperti yang dikehendaki. Di sini peran pendidikan nasional teramat penting, baik yang diselenggarakan di sekolah, dalam masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Melalui sistem pendidikan akan tampil dan ditempa pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan menentukan pula kualitas pemimpin masa depan.